



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016



**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 dapat disusun dengan sebaik-baiknya.

Renja ini secara garis besar menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, kebijakan dan program serta target dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui RKPD dan Renstra Tahun 2014-2019, Program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Diharapkan dengan Renja ini, semua kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dapat dijadikan pedoman dalam mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Donggala dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati dibidang pemberdayaan masyarakat.

Donggala, Januari 2016

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala,

Dra. ARITATRIANA, M.Si
NIP.19740414 199311 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa adalah dokumen perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2016. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Tahap Penyajian rancangan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam Penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Donggala Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Selanjutnya di laksanakan Musrenbang Desa dan Kecamatan untuk menggali Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala disusun dengan :

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra BPMPD, Bappeda dan Penanaman Modal;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya akan dipergunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008.

1.2.1. Kewenangan (Mandat)

Berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 25 Tahun 2009, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala mempunyai Kewenangan sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan daerah bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan .
2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan .

3. Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
5. Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
6. Database Pemerintahan Desa dan kelurahan meliputi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
7. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

1.2.2 ORGANISASI DAN TATA KERJA.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Kasub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - b. Kasub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Kasub Bagian Perencanaan Program.

3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan :
 - a. Kasub Bidang Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa / Kelurahan.
 - b. Kasub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Desa / Kelurahan.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat :
 - a. Kasub Bidang Kelembagaan Adat Istiadat dan Perempuan Desa / Kelurahan.
 - b. Kasub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pelatihan Masyarakat.
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat :
 - a. Kasub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
 - b. Kasub Bidang Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok Masyarakat.
6. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna :
 - a. Kasub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Lokal dan Teknologi Tepat Guna..
 - b. Kasub Bidang Infrastruktur Pedesaan.

1.3 PERAN STRATEGIS.

1. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan termasuk masyarakat miskin untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.
2. Melestarikan pluralisnya tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat yang merupakan kekayaan hasanah kebudayaan bangsa.
3. Penetapan kebijakan daerah bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

4. Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
5. Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
6. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

1.4 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif pada saat sekarang ini Badan PMPD Kabupaten Donggala di dukung kekuatan sumber daya manusia yang di miliki sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (Aparatur).

Jumlah Pegawai (Aparatur) sebanyak 62 orang terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 30 Orang.
- Pegawai Harian Lepas (PHL) : 31 Orang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal, terdiri dari :

- Sarjana Starta II (S2) : 9 Orang
- Sarjana Starta I (S1) : 23 Orang
- Sarjana Muda / Diploma : 2 Orang
- SLTA / Sederajat : 27 Orang

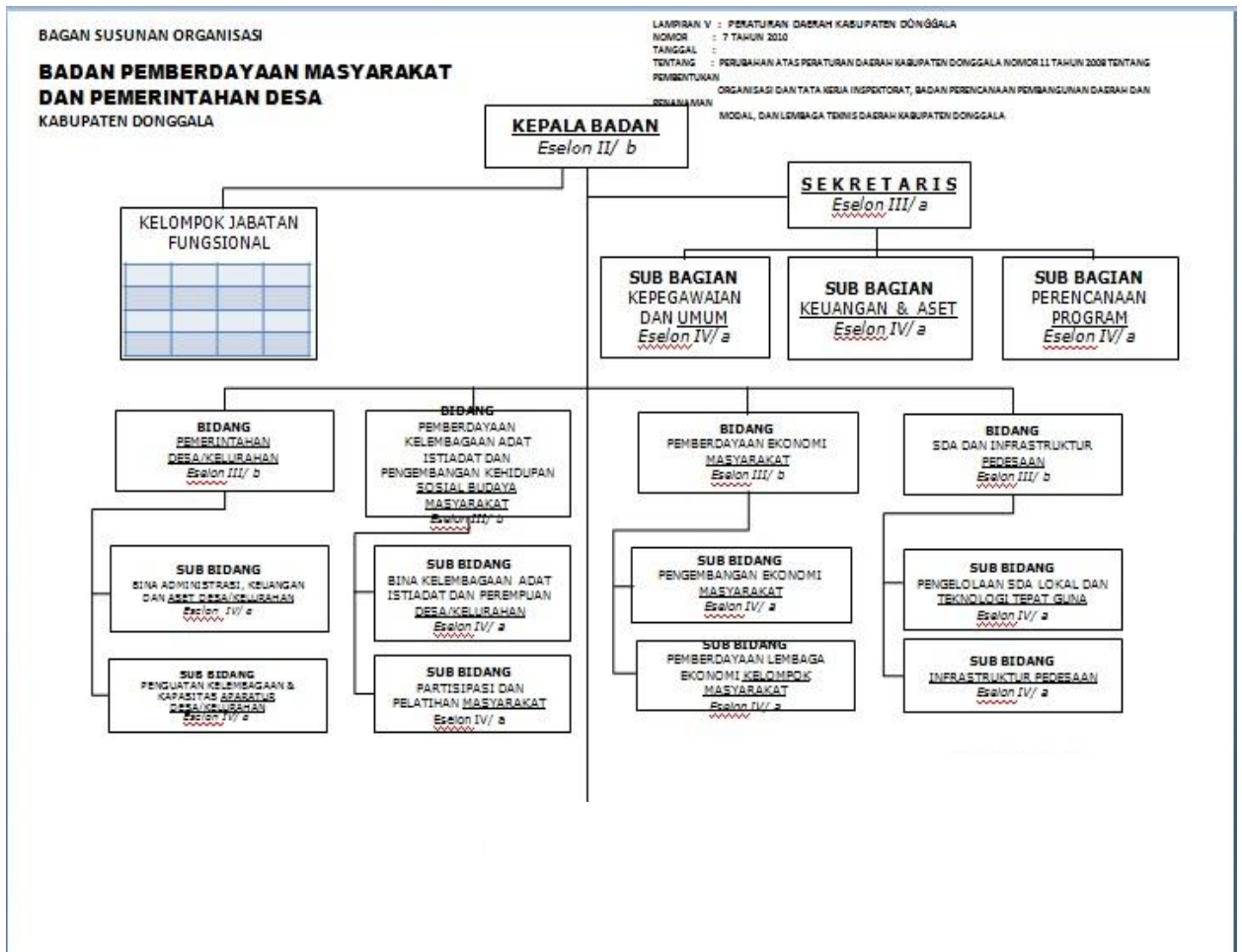
Berdasarkan Jenjang Kepangkatan, terdiri dari :

- Golongan IV : 5 Orang
- Golongan III : 20 Orang
- Golongan II : 5 Orang

Berdasarkan Jabatan (Eselon), terdiri dari :

- Eselon II : 1 Orang

- Eselon III : 5 Orang
- Eselon IV : 11 Orang
- Non Eselon : 13 Orang



1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 25 Tahun 2009, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. BPMPD mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
2. BPMPD dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

1.6 PERAN STRATEGIS.

- a. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan termasuk masyarakat miskin untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.
- b. Melestarikan pluralisnya tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat yang merupakan kekayaan hasanah kebudayaan bangsa.
- c. Penetapan kebijakan daerah bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- d. Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- e. Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Pemerintahan Desa

dan Kelurahan serta bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

- f. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

1.7 MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah untuk mensinkronkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan yang berisi program dan Kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2014 yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan akhir RKPD untuk dibahas dalam Musrenbang Tingkat Kabupaten yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi RAPBD.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menjadi acuan dalam Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang dari Desa dan Kecamatan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN.

Dalam Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BPMPD Kabupaten Donggala tahun 2016 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN UMUM

1.2.1 KEWENGANGAN (MANDAT)

1.2.2 ORGANISASI DAN TATA KERJA

1.3 PERAN STRATEGIS

1.4 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI

1.5 TUGAS DAN FUNGSI

1.6 PERAN STRATEGIS

1.7 MAKSUD DAN TUJUAN

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2014

2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

2.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGI

2.3 VISI DAN MISI BPMPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN

3.2 SASARAN

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2015

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala telah berupaya secara maksimal agar program yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja yang selanjutnya dijabarkan dalam RKPD setiap Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program dan Kegiatan yang dievaluasi sesuai Renja Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (Delapan) Program dan 18 (Delapan Belas) Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp).	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	◆ Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran. ◆ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.	1.149.112.000 429.540.000	1.061.174.032 392.561.850	92 % 91 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	◆ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	671.360.000	668.505.000	99 %
3.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	◆ Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan. ◆ Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Perdesaan	186.457.000 74.886.029	93.910.000 72.663.029	50 % 97 %

4.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	◆ Fasilitasi Pemasyarakatan dan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional.	139.460.000	115.431.000	83 %
		◆ Pengendalian Administrasi PNPM – MP.	715.520.000	684.365.800	95 %
		◆ Fasilitasi Peningkatan Budaya Gotong Royong dan Peran Lembaga Adat.	545.913.000	529.801.700	97 %
		◆ Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa /Kelurahan.	329.607.000	324.185.500	98 %
		◆ Pengendalian Pamsimas dan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman.	177.065.000	132.304.700	74%
		◆ Dukungan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu di Kab. Donggala.	205.750.000	188.025.000	91 %
		◆ Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.	141.055.000	137.680.000	97 %
5.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	◆ Fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan ADD.	1.109.590.000	986.450.900	89 %
		◆ Pelatihan Manajemen Aparatur Pemerintahan Desa.	266.765.000	258.467.650	96 %
6.	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Fasilitasi Tim Penggerak PKK Kab. Donggala.	660.320.000	637.140.350	96 %
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa	◆ Pelantikan Kepala Desa dan BPD.	670.792.000	621.795.700	92 %
		◆ Pengkajian & Penetapan Tapal Batas Desa	12.580.000	0	0 %
8.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pengendalian Administrasi Penguatan Kelembagaan BUMDesa	499.032.471	479.309.200	96 %

2.1. Identifikasi Permasalahan

Dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, memantapkan pembangunan menuju desa yang mandiri dan sejahtera, maka BPMPD merumuskan identifikasi permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPMPD

Aspek kajian	Capaian/Kon disisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Lembaga Adat diperdesaan	120 lembaga adat yang terbentuk dari 167 Desa/Kel. Namun belum berperan secara optimal	SK Pembentukan Lembaga Adat	Terbatasnya Anggaran untuk menyelenggarakan BIMTEK/Pelatihan/ Pembinaan bagi Lembaga adat	Kurangnya Pemberdayaan dari Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peran Lembaga Adat yang belum maksimal - Belum terbentuknya 47 Lembaga Adat
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	167 yang telah di terbentuk Namun Masih dirasakan kurangnya Pemahaman atas peran dari LPM	SK Pengangkatan	Terbatasnya Anggaran untuk menyelenggarakan Pelatihan dan sosialisasi tupoksi LPM	Kurangnya Pemberdayaan dari Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peran LPM belum optimal
Lembaga Ekonomi Pedesaan	11 Desa yang telah memiliki PERDES tentang BUMDES dari 158 Desa sehingga masih terlihat belum optimal peran BUMdes	PERDES Bumdes	Terbatasnya Anggaran untuk BIMTEK / Pembinaan/Pendam pingan Program	Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang peran BUMdes serta terbatasnya kemampuan keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peran Pemerintah Desa dan BPD belum Optimal - Belum terbentuknya BUMDES disertai penyertaan modal yang memadai.
	158 Desa belum	Terbentuknya	Terbatasnya	Kurangnya	Belum dibentuk

	tersosialisasi CPPDes secara menyeluruh	pengelolaan CPPDes di Tingkat Desa	Anggaran untuk Sosialisasi/BIMTE K CPPDes	Pemberdayaan dari Pemerintah Desa	Pengelola CPPDes di 158 Desa
	Belum optimalnya tata kelola pasar desa serta belum adanya Perda tentang Pasar Desa	Perda tentang Pasar Desa	Terbatasnya Anggaran untuk Penyusunan Perda tentang Pasar Desa	Pasar yang berada di desa belum sepenuhnya diserahkan kepada desa berdasarkan permendagri	Pengelolaan Pasar Desa belum diserahkan sepenuhnya ke Desa
	Database Lembaga Ekonomi Pedesaan belum ada	Aplikasi Database Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbatasnya Anggaran Penyusunan Aplikasi Database LEP	Lemahnya Koordinasi antar lintas sektor	Database tentang LEP belum ada di Kab. Donggala
	Belum teridentifikasinya Produk Unggulan Setiap Desa	Kabupaten maupun Kecamatan dalam angkaDesa	Terbatasnya Anggaran untuk Pengidentifikasian Produk Unggulan Desa	Lemahnya Sistem informasi lintas sektor	Produk Unggulan 158 Desa belum Teridentifikasi
Peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.	158 Desa dan 9 Kel telah melakukan /Melaksanakan Proses Perencanaan Pembangunan Namun belum optimal dirasakan realisasinya	RPJMDes dan Dokumen hasil Musrebang dan RKPDes	Terbatasnya anggaran biaya untuk bintek/pelatihan-pelatihan teknis penyusunan dokumen pembangunan	Terbatasnya SDM dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta rendahnya partisipasi dalam proses perencanaan	Terbatasnya anggaran dan lemahnya komitmen atas kebijakan perencanaan dan pelaksanaannya kepada masyarakat
Penyelenggaraan pemerintahan desa.	Rendahnya pemahaman penyelenggara Pemerintahan Desa atas Tugas pokok dan fungsinya	Masih terbatasnya penyelenggara pemerintahan desa yang telah mengikuti Bintek dan Pelatihan	Terbatasnya anggaran untuk menyelenggarakan Bintek	Masih rendahnya tingkat pendidikan formal	Terbatasnya anggaran serta sarana dan prasarana lainnya
	Belum sepenuhnya desa menggunakan Administrasi Pemerintahan Desa.	28 Administrasi Pemerintahan Desa	Terbatasnya anggaran untuk menyelenggarakan Bintek	Masih rendahnya pemahaman Aparatur Pemerintahan desa dalam mengelola administrasi.	Terbatasnya anggaran dan SDM serta belum Optimalnya Pemanfaatan Anggaran Desa.
	167 Desa/Kel yang ada, masih terdapat Desa yang belum memiliki Kantor	- Kantor Desa - Kantor BPD	Terbatasnya anggaran	Belum maksimalnya Desa dalam mengelola potensi sumber	Terbatasnya SDM dan SDA

	Desa, Kantor BPD, Kantor LPM dan Balai Pertemuan serta Sarana pendukungnya Lainnya	- Kantor LPM - Balai Pertemuan dan lainnya		pendapatan desa	
Peran serta kaum perempuan dalam pembangunan desa dipedesaan.	167 Desa/Kel telah terbentuk TP-PKK, Namun Peran PKK di Desa belum optimal	SK Pembentukan TP-PKK	Kurangnya bimbingan dan pembinaan dari Instansi terkait	Belum didukung dengan anggaran APBdesa yang memadai	Belum berperannya PKK secara optimal
Perlombaan Desa dan Kelurahan	Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan aturan	Permendagri Nomor 13 Tahun 2007	Pembinaan dan bimbingan untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten dan propinsi tidak maksimal	Kec hanya mempersiapkan satu desa dari sejumlah desa diwilayahnya, khusus utk mengikuti lomba desa. Sebagai akibat terbatasnya anggaran yg di kelola kecamatan dan desa	Kegiatannya nampak bila ada lomba
Kelompok Kerja Posyandu	Terbentuknya 447 Posyandu dari 167 Desa/Kel., Namun belum berperan secara optimal	- Keputusan Desa/Kel. - Adanya Pengurus Pokja Posyandu Desa/Kel.	Belum semua Posyandu mendapatkan Pembinaan, arahan dan bimbingan teknis	Pengurus Pokja Posyandu belum fokus pada tugas masing-masing serta lambatnya peningkatan strata Posyandu	Terbatasnya Komuditas dan Kuantitas Kader Pengunjung belum terlayani dengan baik
Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS)	84 BP-SPAMS yang telah terbentuk, namun baru 61 BP-SPAMS dalam kondisi baik organisasinya (73 %)	SK Pembentukan	Terbatasnya anggaran untuk menyelenggarakan Bintek/Pelatihan bagi pengurus BP-SPAMS	Minimnya dukungan dari Pemerintah Desa setempat	- Peran pengurus belum optimal - Kesadaran masyarakat desa dalam memberikan kontribusi atas pelayanan yang diterima tidak optimal

2.2. Penentuan Isu-Isu Strategi

Secara Umum berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 Kabupaten Donggala telah identifikasi bahwa isu-isu strategis yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Belum mantapnya penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Rendahnya pemahaman terhadap jati diri desa yang bersumber keaslian asal usul dan adat istiadat setempat untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa;
3. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;
4. Kemampuan masyarakat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahamannya terhadap kewenangan desa itu sendiri;
5. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan motivasi dan dedikasi kerja tidak optimal;
6. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam usaha meningkatkan dan menguatkan otonomi desa;
8. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif

dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;

9. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal;
10. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas;
11. Lembaga desa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal;
12. Kemampuan pemerintah desa dalam menggali sumber pendapatan dan mengelolah keuangan desa masih rendah sehingga kemandirian desa juga rendah;
13. Masih tingginya angka kemiskinan di daerah pedesaan.

isu strategis di atas perlu direspon bersama antara Pemerintah, Pelaku usaha maupun masyarakat, dimana memerlukan integrasi dan sinergitas antara kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan jaman, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan Program Prioritas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala 2014-2019. Diharapkan dari analisis ini, dapat teridentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (treats) yang ada.

Atas dasar itulah, strategi pencapaian Visi dan Misi organisasi dapat diformulasikan. Selain itu, atas dasar analisis lingkungan ini juga dapat ditentukan faktor-faktor kunci yang

menentukan keberhasilan implementasi strategi dalam mencapai Visi Misi yang telah ditetapkan.

Kemudian berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada tabel 3.1 tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPMPD, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala, yaitu :

1. Metoda interaksi antara faktor kekuatan (strengths) dengan faktor Peluang (opportunities) dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda interaksi antara faktor kekuatan (strengths) dengan faktor Ancaman (threats) dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda interaksi antara faktor kelemahan (weaknesses) dengan faktor peluang (opportunities) dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metoda interaksi antara faktor kelemahan (weaknesses) dengan faktor ancaman (threats) dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

2.2.1 Analisis Lingkungan Strategis

Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMPD Kabupaten Donggala. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan pembahasan diatas,

maka dapat diuraikan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis Lingkungan Internal (ALI) BPMPD Donggala

No	Kekuatan	No	Kelemahan
1	Adanya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan job discription yang jelas	1	Kurang disiplin PNS
2	Adanya Dukungan dan Komitmen Pemimpin Daerah	2	Kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa belum optimal
3	Tersedianya Sumber Daya Manusia	3	Jumlah PNS yang masih terbatas berdasarkan kebutuhan organisasi
4	Sarana dan Prasarana yang memadai	4	Kompetensi Pegawai belum optimal
5	Suasana kerja yang demokratis dan dinamis yang dilandasi kebersamaan dan kekeluargaan	5	Terbatasnya anggaran

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) BPMPD Donggala

No	Peluang	No	Tantangan
1	Pemanfaatan Sumber daya alam yang mendukung usaha ekonomi masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna.	1	Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat serta Daya beli dan daya saing masyarakat yang cukup rendah
2	Adanya pelatihan peningkatan kapasitas SDM yang berkesinambungan.	2	Seringnya pergantian aparatur pemerintah desa dan kader pembangunan desa.
3	Kerjasama Kecamatan dan lembaga desa saling mendukung.	3	Kurangnya dukungan Kebijakan anggaran ke pemerintah desa dan lembaga desa.
4	Koordinasi dengan pihak terkait yang terbuka luas.	4	Kebijakan dan peraturan baik ditingkat daerah, propinsi maupun nasional yang sering berubah-ubah.
5	Kerjasama dengan pihak lain dalam merencanakan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Donggala	5	Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap Pemerintah dan tidak disertai dengan partisipasi masyarakat.

3. Strategi pilihan

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi BPMPD Kabupaten Donggala

ANALISIS STRATEGI ALTERNATIF DAN PILIHAN

DENGAN ANALISIS SWOT

<p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> Adanya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan job discription yang jelas Adanya Dukungan dan Komitmen Pemimpin Daerah Tersedianya Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana yang memadai Suasana kerja yang demokratis dan dinamis yang dilandasi kebersamaan dan kekeluargaan 	<ol style="list-style-type: none"> Kurang disiplin PNS Kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa belum optimal. Jumlah PNS yang masih terbatas berdasarkan kebutuhan organisasi. Kompetensi Pegawai belum optimal. Terbatasnya anggaran.
PELUANG (O)	S – O	W – O

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Sumber daya alam yang mendukung usaha ekonomi masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna. 2. Adanya pelatihan peningkatan kapasitas SDM yang berkesinambungan. 3. Kerja sama Pemerintah Desa dan lembaga desa saling mendukung. 4. Koordinasi dengan pihak terkait yang terbuka luas. 5. Kerjasama dengan pihak lain dalam merencanakan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Donggala. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan Penerapan Teknologi Tepat Guna. 2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa. 3. Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi. 4. Meningkatkan Dukungan dengan pihak terkait. 5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam perencanaan pembangunan Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Peraturan disiplin Pegawai secara konsisten. 2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai. 3. Meningkatkan Kerja sama Pemerintah Desa dan lembaga desa yang saling mendukung. 4. Meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait. 5. Meningkatkan kualitas dan memperbanyak kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di desa.
TANTANGAN (T)	S – T	W – T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat serta Daya beli dan daya saing masyarakat yang cukup rendah 2. Seringnya pergantian aparatur pemerintah desa dan kader pembangunan desa. 3. Kurangnya dukungan Kebijakan anggaran ke Kecamatan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan SDM serta SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan job discription yang jelas untuk mengatasi tuntutan dan aspirasi masyarakat. 2. Mengoptimalkan Dukungan dan Komitmen Pemimpin Daerah dalam penataan aparatur pemerintah desa dan kader pembangunan desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka menghadapi tuntutan masyarakat. 2. Mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. 3. Meningkatkan anggaran untuk mendukung pemerintah desa dan

<p>lembaga desa.</p> <p>4. Kebijakan dan peraturan baik ditingkat daerah, propinsi maupun nasional yang sering berubah-ubah.</p> <p>5. Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap Pemerintah dan tidak disertai dengan partisipasi masyarakat.</p>	<p>3. Mengoptimalkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai dengan peningkatan anggaran pemerintah desa dan lembaga desa.</p> <p>4. Mengoptimalkan Sumber daya Manusia dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dan peraturan .</p> <p>5. Mengoptimalkan partisipasi dan kesadaran masyarakat.</p>	<p>lembaga desa</p> <p>4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.</p> <p>5. Mendayagunakan kemampuan pemerintahan desa untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.</p>
--	--	--

2.2.2 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan- pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi,dan misi BPMPD Kabupaten Donggala. Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode profesional judgement maka terdapat 20 strategi pilihan atau Analisis Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut :

1. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa.
3. Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi.

4. Meningkatkan Dukungan dengan pihak terkait.
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam perencanaan pembangunan Desa.
6. Mengoptimalkan SDM serta SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan job discription yang jelas untuk mengatasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
7. Mengoptimalkan Dukungan dan Komitmen Pemimpin Daerah dalam penataan aparatur pemerintah desa dan kader pembangunan desa.
8. Mengoptimalkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai dengan meningkatkan anggaran pemerintah desa dan lembaga desa.
9. Mengoptimalkan Sumber daya Manusia dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dan peraturan .
10. Mengoptimalkan partisipasi dan kesadaran masyarakat.
11. Penerapan Peraturan disiplin Pegawai secara konsisten.
12. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
13. Meningkatkan Kerja sama pemerintah desa dan lembaga desa yang saling mendukung.
14. Meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait.
15. Meningkatkan kualitas dan memperbanyak kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di desa.
16. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka menghadapi tuntutan masyarakat.
17. Mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan pemerintahan desa dan masyarakat desa.
18. Meningkatkan anggaran untuk mendukung pemerintah desa dan lembaga desa

19. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.
20. Mendayagunakan kemampuan pemerintahan desa untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

2.2.3 Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa faktor Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut : 1). FPK I Mengoptimalkan SDM serta SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan job discription yang jelas untuk mengatasi tuntutan dan aspirasi masyarakat 2). FPK II Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa. 3). FPK III Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan Penerapan Teknologi Tepat Guna 4). FPK IV Meningkatkan anggaran untuk mendukung pemerintah desa dan lembaga desa.

2.3. Visi dan Misi BPMPD.

2.3.1 Visi BPMPD

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa visi dalam SKPD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Sesuai dengan amanat ini, maka visi BPMPD Kabupaten Donggala adalah gambaran yang ingin dicapai pada akhir periode 2014-2019. Mengacu pada permasalahan dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan sejalan dengan tahapan pembangunan dalam RPJP Kabupaten Donggala, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, maka visi BPMPD Kabupaten Donggala adalah:

**“TERWUJUDNYA DESA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA
BERBASIS SUMBER DAYA BERKELANJUTAN”**

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) yang perlu dijabarkan kedalam misi dan diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran BPMPD Kabupaten Donggala. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan yang jelas, terarah, dan terukur untuk mewujudkan visi tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok dari visi yang dimaksud adalah *mandiri, sejahtera, sumber daya, dan berkelanjutan*. Pokok-pokok visi dijelaskan secara detail dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Perumusan penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
TERWUJUDNYA DESA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS SUMBER DAYA BERKELANJUTAN	Terwujudnya	<ul style="list-style-type: none"> • mengandung esensi adanya komitmen BPMPD Kabupaten Donggala untuk melakukan upaya-upaya yang dinamis, sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat Pengelolaan Pemerintahan Yang baik Kab. Donggala.
	Mandiri dan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri tanpa bergantung pd orang lain • Sejahtera adalah keadaan Masyarakat yang Meningkatnya taraf hidupnya yang tampak dari meningkatnya pendapatan serta terbukanya lapangan pekerjaan dan lain-lain.
	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya merupakan Potensi yang senantiasa ditingkatkan baik dari aspek SDM maupun SDA

		secara menyeluruh
	Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • prinsip “berkelanjutan” sehingga tidak hanya berorientasi untuk kepentingan jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang. Artinya bahwa pembangunan yang dilakukan harus memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan tetap terjamin, sehingga sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan dapat terus berkelanjutan

2.3.2 Misi BPMPD

Untuk Mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala ditetapkan Misi. Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi atau diadakan dan harus diemban oleh setiap instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien. Berdasarkan Visi di Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala yang telah ditetapkan, maka Misi BPMPD Kabupaten Donggala sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan Kelurahan.
2. Meningkatkan partisipasi dan kelembagaan masyarakat.
3. Mengoptimalkan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Pedesaan yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN

BPMPD Tujuan Kabupaten Donggala untuk merealisasikan misi adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pengelolaan administrasi dan keuangan serta pelayanan pemerintah desa dan kelurahan
2. Memantapkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan
3. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
4. Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG)
5. Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat.
6. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan
7. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam mengolah SDA dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan

3.2 SASARAN.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka BPMPD menjabarkannya dalam suatu sasaran yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemerintahan desa dan kelurahan secara dinamis dan berkelanjutan

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui penguatan kelembagaan masyarakat
4. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat
5. Pengembangan adat istiadat / sosial budaya masyarakat
6. Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat
7. Teridentifikasinya Produk unggulan ekonomi masyarakat
8. Terbentuknya kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya
9. Meningkatnya Pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam mengelola SDA dan TTG.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.

Program Dan Kegiatan BPMPD.

- a. Program Administrasi Perkantoran, Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
 - Rapat-rapat Konsultasi dan koordinasi.
- b. Program Sarana Prasarana Aparatur, Kegiatan :
 - Pengadaan sarana dan prasarana kantor.
- c. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perdesaan, Kegiatan :
 - Fasilitasi Kelembagaan masyarakat perdesaan.
- d. Program Peningkatan Partisipasi Dalam Membangun Desa
Kegiatan :
 - Fasilitasi Pemasyarakatan dan Gelar teknologi Tepat Guna (TTG)
 - Fasilitasi Peningkatan Budaya Gotong Royong Masyarakat dan Peran Lambaga Ada.
 - Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa / Kelurahan.
 - Pengendalian PAMSIMAS Inventarisasi Data Base Infrastruktur Pedesaan.

- Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa / Kelurahan.
- Pengendalian Administrasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan
 - Pelatihan Manajemen Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan.
 - Fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan ADD.
- f. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan Kegiatan :
 - Pengendalian Kegiatan Tim Penggerak PKK Kab. Donggala.
- g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa Kegiatan
 - Pelantikan Kades dan BPD.
- h. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
 - Pengendalian Administrasi Penguatan Kelembagaan BUMDes
 - Fasilitasi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Desa
 - Pengendalian Administrasi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kabupaten Donggala.
 - Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari beberapa uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala telah melaksanakan tugasnya dan berupaya secara maksimal dimana Program / Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap Tahun Anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Disadari bahwa dari apa yang dicapai selama ini terdapat kekurangan dan hambatan dalam mewujudkan keberhasilan - keberhasilan tersebut yaitu masih belum optimalnya pemberdayaan dan pendayagunaan aparat, khususnya dalam hal pembinaan dan pemberian sanksi-sanksi sehingga terdapat sebagian aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang belum dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya secara disiplin.

Oleh karena itu diharapkan kedepan agar dapat tercapai hasil yang optimal maka diperlukan aparat yang mampu dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

Matriks Rancangan Kinerja Tahun 2016								
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa								
Kabupaten Donggala								
Sasaran			Program	Kegiatan			Rencana TKT.Capaian	Ket.
Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terciptanya Layanan administrasi yang mudah dan tepat waktu.	Peningkatan proses pelayanan publik dan tepat waktu.	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Input : * Dana Output : * Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Outcome : * Prosentase lancarnya Administrasi perkantoran	Rp Keg/Org 100%	995.640.000	
				Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi.	Input : * Dana Output : * Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi Outcome : * Prosentase Hasil Rapat Konsultasi dan Koordinasi.	Rp Keg/Org Keg/Org	364.797.546	
Terwujudnya proses pelayanan publik dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang berkualitas	Peningkatan Kualitas pelayanan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang baik.	80%	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Input : * Dana Output : * Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan Outcome : * Prosentase Peningkatan kualitas sarana & prasarana yang efektif dan efisien	Juta Keg/Org 80%	364.775.750	
Berperannya lembaga masyarakat dan Kader pemberdayaan masyarakat dlm rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan organisasi masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan.	80%	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Input : * Dana Output : * Jumlah kecamatan yg mengolah data dan jmlh peserta yg mengikuti rakor. Outcome : * Prosentase masyarakat yang di berdayakan.	Rp Keg/Org 80%	135.790.000	
Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa	Terlayannya masyarakat desa dlm mengembangkan usaha produktif	90%	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pengendalian Adm. Penguatan Kelembagaan BUMDes	Input : * Dana Output : * Jumlah Peserta pelatihan LKMP di bina Outcome : * Prosentase Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Berkembang	Rp 105 Org 15 Desa	1.000.000.000	
Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwira-usaha) masyarakat desa.	Meningkatkan beragam usaha dlm menunjang perekonomian masyarakat desa.			Fasilitasi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPDes)	Input : * Dana Output : * Jumlah Kecamatan Sosialisasi (CPPDes) Outcome : * Prosentase Lembaga Ekonomi Desa yang Berkembang	Rp 16 Kec. 15 Desa	115.242.000	
				Pengendalian Adm. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat PIE Kabupaten Donggala.	Input : * Dana Output : * Jumlah UMKMP yang Mendapatkan Modal. Outcome : * Prosentase lembaga ekonomi pedesaan yang berkembang.	Rp 80 Org 9 Desa	177.220.000	
				BIMTEK Pengelolaan Pasar Desa.	Input : * Dana Output : * Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Pasar desa. Outcome : * Prosentase meningkatnya kemampuan Lembaga Desa dlm pengelolaan pasar	Rp 35 Org 80%	165.094.000	

Tertatanya nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat lokal melalui peran lembaga adat yang maju dan dinamis, terjadinya semangat gotong royong masyarakat, pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna serta pelaksanaan kegiatan PNP-MP	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai budaya, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna serta pelaksanaan PNP-MP	70%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.	Fasilitasi Pemasarakatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Input : * Dana Output : * Jumlah Orang yang mengikuti Gelar TTG Nasional Outcome : * Persentase Masy.yang Berpartisipasi Dim Pelaksanaan & Pengawasan Pembangunan	Rp Orang 85%	243.780.000
				Fasilitasi peningkatan budaya gotong royong dan peran lembaga adat.	Input : * Dana Output : * Jumlah Peserta yang mengikuti BBGRM Outcome : * Prosentase Masy.yang Berpartisipasi Dim Pelaksanaan & Pengawasan Pembangunan	Rp 39 SKPD 80%	387.515.000
				Fasilitasi Pelaksanaan penilaian perimbangan desa/kel.	Input : * Dana Output : * Jumlah desa/kel yang mengikuti penilaian Outcome : * Prosentase jumlah desa/kelurahan yang menjadi pemenang lomba	Rp Desa/Kel 80%	307.545.000
				Pengendalian Administrasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Input : * Dana Output : * Terbentuknya Kawasan Perdesaan Outcome : * Prosentase pemanfaatan Teknologi Pedesaan.	Rp 1 Kawasan 80%	319.031.000
				Pengendalian Pamsimas	Input : * Dana Output : * Jumlah Monev Program PAMSIMAS Outcome : * Prosentase dimanfaatkannya Dokumen Laporan Hasil pembinaan	Rp Dokumen 80%	154.969.000
Terselenggaranya Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang efektif dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan secara partisipatif sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.	Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam pengelolaan pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Donggala.	80%	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pelatihan Managemen Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	Input : * Dana Output : * Jumlah aparat perangkat desa dan Lembaga desa yg mengikuti pelatihan Outcome : * Prosentase peningkatan kualitas aparatur Pemerintahan Desa.	Rp Orang 80%	638.830.500
				Fasilitasi Pengendalian ADD	Input : * Dana Output : * Jumlah Desa yang diBina dalam ADD Outcome : * Prosentase meningkatnya kemampuan aparat desa dim mengelola ADD	Rp Dokumen 80%	989.890.000
		70%	Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD,	Input : * Dana Output : * Jumlah Kepala desa dan BPD yang di Lantik Outcome : * Prosentase Perangkat desa yang Terisi	Rp 16 Kec 80%	404.070.000
Memantapkan Penguatan Kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat.	75%	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.	Fasilitasi TP-PKK Kabupaten Donggala	Input : * Dana Output : * Jumlah Fasilitasi Dim Kegiatan PKK Outcome : * Prosentase jumlah PKK Desa Yang Aktif Dan Kelompok yang dibina	Rp 9 Keg 135 Desa/ 27 Kl/p	852.220.000
Jumlah Anggaran Total							7.757.464.796,00
Jumlah Program : 8 (Delapan).							
Jumlah Kegiatan : 18 (Delapan Belas).							
Donggala, 2015							
KEPALA BPMPD KABUPATEN DONGGALA							
Dra. LUTFIAH MANGUN							
NIP. 19630727 198703 2 016							